



## PANSUS

### Sisir Anggaran

**KETUA** Pansus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) anggaran DPRD Kota Pontianak, Mujiono melihat terdapat persoalan pada penggunaan anggaran daerah Pemerintah Kota Pontianak tahun lalu. Secara keseluruhan ia melihat penggunaan anggaran belanja keluar justru lebih besar dibanding pemasukan, sehingga menyebabkan ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran.

"Ada beberapa isu yang akan kami bahas bersama Pemkot saat pansus LKPj 2021. Utamanya tentang klasifikasi keuangan daerah," ujar Mujiono kepada Pontianak Post, Jumat (8/4).

Secara detail, memang belum dilihat penggunaan anggaran ini. Oleh sebab itu, pansus LKPj dibentuk. Di sini, Mujiono melihat klasifikasi keuangan Pemkot masih tinggi.

◆ Ke Halaman 15 kolom 5



Mujiono

### Sisir Anggaran

Sambungan dari halaman 9

Belum lagi isunya, terdapat defisit angka hingga Rp200 miliar. Kesemuanya harus diselesaikan agar perspektif masyarakat akan penggunaan anggaran tidak ke arah negatif.

Lebih dalam pembahasan LKPj ini, akan melihat penggunaan anggaran dan kinerja pendapatan. Dari sisi pendapatan apakah yang ditarget tercapai. Jika tidak, teman-teman dari tim pansus ingin mengetahui sebabnya. "Apakah target terlampaui tinggi, atau persoalannya ada di OPD tersebut," singgungnya.

Dari data yang didapat Mujiono. Untuk target PBB Rp80 miliar justru hanya mampu meraih Rp50 miliar. Turun. Belum lagi pajak hiburan dari yang ditarget justru turun cukup jauh. Sama dengan pajak sarang burung walet. Dari Rp1 miliar pertahun, justru hanya terkumpul puluhan juta.

Di pansus akan dicari

penyebabnya. Apakah karena pandemi covid 19 atau justru kinerja OPD belum maksimal.

Menurut Mujiono, sebenarnya masih banyak potensi pajak yang belum tergali. Seperti pajak hiburan, pajak parkir dan retribusi parkir pemasukannya belum maksimal dan sesuai target.

Ia tak mau menden- gar alasan OPD karena minimnya SDM. Sebab alokasi anggaran buat Badan Keuangan Daerah tak sedikit. Selain menerima gaji dan TPP. Mereka juga

mendapat insentif. Belum lagi jika capaian pajak tercapai. "Harusnya ada korelasi dengan anggaran yang sudah dikeluarkan," ungkapnya.

Pihaknya sudah mendorong BKD untuk meningkatkan PAD. Kabar baik dari BKD lalu, terdapat penambahan pajak parkir sebesar Rp1,7 miliar.

Pada diskusi LKPj akan dilihat potensi-potensi pemasukan. Kesemua harus disebut. Jangan sampai di tahun ini pengeluaran justru lebih besar dibanding pemasukan. Jelas tidak sehat. (iza)